

ABSTRACT

The implementation of Internal Control System (SPI) in government environment is something that must be done, this is confirmed by the issuance of Government Regulation (PP) No. 60 Year 2008. The implementation of SPI is meant to increase sufficient confidence that the administration of activities in a governmental entity can (1) achieve its goals efficiently and effectively; (2) report the state finance reliably; (3) secure state assets; and (4) encourage towards compliance with current regulations. Magister of Accounting, Universitas Gadjah Mada (MAKSI-UGM), as one of the organizations under the government, must also implement the system. The aim of this research is to explore internal control system that is attached on the non-academic administration, and then assess its compliance to the PP No. 60 Year 2008 on Government's Internal Control System at MAKSI UGM. To reach the research purposes, interviews, observations, documentations, and questionnaires were used. The research results showed that the level of compliance in the implementation of SPIP in the non-academic administration with the PP No. 60, Year 2008 is 86.68 percent. If seen from each of the elements, the implementation of SPI on the element of control environment reached the highest level of compliance with the PP No. 60, Year 2008, that is, 25 percent, and then followed by the element of monitoring, 14 percent, and the element of information and communication, 8.29 percent. Recommendation from this research is that there should be efforts to optimize the management of supplies; efforts to improve communication among sections; and efforts to renew and to establish an SOP.

Keywords: Government internal control system, Government Regulation (PP) No. 60 Year 2008, non-academic internal control system, non-academic system operational procedures.

INTISARI

Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan pemerintahan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan SPI ini untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu entitas pemerintah dapat (1) mencapai tujuannya secara efisien dan efektif; (2) melaporkan keuangan negara secara andal; (3) mengamankan aset negara; dan (4) mendorong pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (Maksi-UGM) sebagai salah satu instansi di bawah pemerintah juga harus melaksanakan sistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi sistem pengendalian internal yang melekat pada tata kelola nonakademik kemudian menilai kesesuaiannya dengan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Maksi UGM. Untuk mencapai tujuan penelitian, wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian implementasi SPI dalam tata kelola nonakademik dengan PP No.60 Tahun 2008 adalah sebesar 86,68 persen. Jika dilihat dari tingkat kesesuaian pada tiap-tiap unsur, implementasi SPI pada unsur lingkungan pengendalian memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dengan PP No.60 Tahun 2008 yaitu sebesar 25 persen, kemudian diikuti oleh unsur kegiatan pengendalian sebesar 22,39 persen, unsur penilaian risiko sebesar 17 persen, unsur pemantauan sebesar 14 persen dan unsur informasi dan komunikasi yaitu sebesar 8,29 persen. Saran dalam penelitian ini adalah agar mengoptimalkan pengelolaan persediaan, meningkatkan komunikasi antarbagian serta perbaharuan dan penetapan SOP.

Kata kunci: sistem pengendalian intern pemerintah, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal nonakademik, sistem operasional prosedur nonakademik.